

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan mendasar dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap-sikap masyarakat dan perubahan dalam institusi-institusi nasional (Todaro & Smith, 2006). Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemberantasan kemiskinan (Mukhlis, 2009).

Menurut Pratowo (2011) tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu negara. Pada Tahun 2000 sebanyak 189 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui delapan butir *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai bentuk komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia yang lainnya pada Tahun 2015 (Todaro & Smith, 2006).

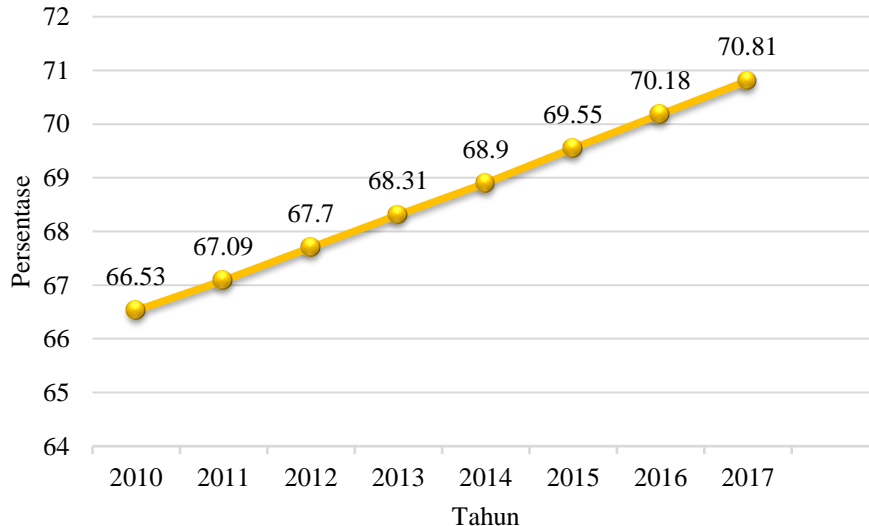
Upaya pengentasan kemiskinan tersebut MDGs telah berhasil mengurangi angka kemiskinan hampir setengahnya dari penduduk dunia (Raharjo, 2015). Kemudian upaya selanjutnya setelah program MDGs ini berakhir 193 anggota PBB kembali merumuskan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), SDGs ini merupakan program pembangunan global yang lebih luas cakupannya dan lebih inklusif yang melibatkan masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan (Smeru Research Insitute, 2017). SDGs ini terdiri dari 17 butir tujuan utama yaitu diantaranya selain fokus utama mengentaskan kemiskinan poin penting yang lainnya yaitu mengurangi kesenjangan dan kesetaraan gender (Raharjo, 2015).

Ukuran keberhasilan pembangunan dari waktu ke waktu mengalami evolusi pemikiran dari mulai *Gross Domestic Product* (GDP) / *Gross National Product* (GNP) yang dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dinilai dari penciptaan barang dan jasa, *Happines Index* atau indeks kebahagiaan untuk

mengukur seberapa bahagia orang dengan hidupnya, dan muncul indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Natadipurba, 2016).

HDI menjadi salah satu indikator sosial yang dijadikan untuk mengukur keberhasilan pembangunan (Subandi, 2012) yang sampai saat ini masih digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Kategori negara maju ditandai dengan tingginya indeks pembangunan manusia, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat yang diukur dari angka harapan hidup, 2) pengetahuan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan 3) standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran (BPS, 2018).

United Nation Development Programme (UNDP) (1990), menyebutkan bahwa ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan manusia yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Empat hal pokok itulah yang menjadi alat ukur atau instrumen indeks pembangunan manusia. Kondisi HDI Indonesia dari Tahun 2010-2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Perkembangan *Human Development Index* Tahun 2010-2017

Sumber: Katadata, 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 HDI Indonesia mengalami peningkatan setiap Tahunnya, hal ini menunjukkan kondisi indeks pembangunan manusia Indonesia ada pada level menengah. Pada Tahun 2017, umur harapan hidup saat lahir (UHH)

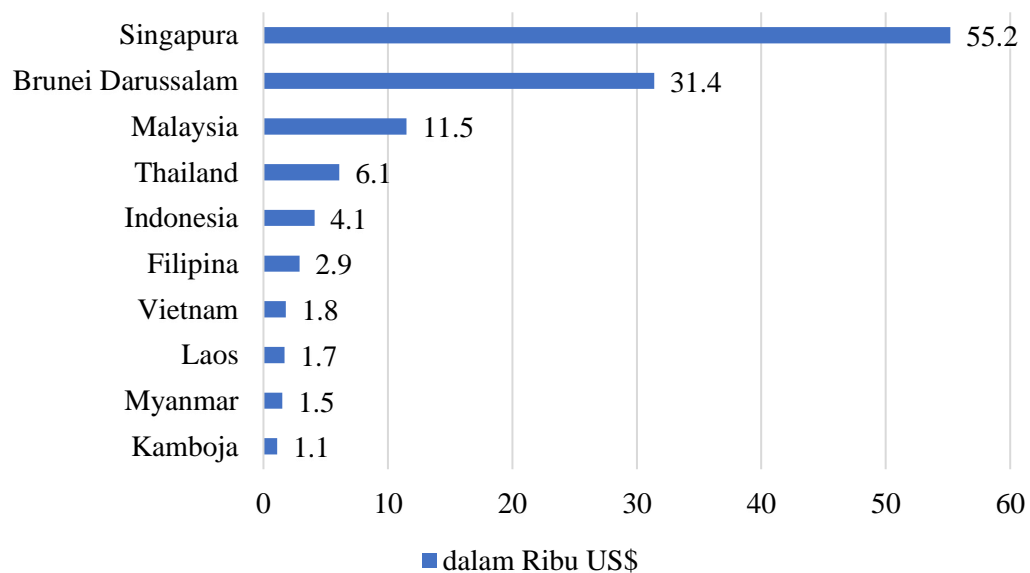
meningkat 0,16 Tahun menjadi 71,06 Tahun. Kemudian harapan lama sekolah (HLS) anak-anak usia 7 Tahun naik 0,13 Tahun menjadi 12,85 Tahun (hingga jenjang Diploma I). Demikian pula penduduk usia 25 Tahun ke atas rata-rata lama sekolahnya (RLS) meningkat 0,15 Tahun menjadi 8,1 Tahun yang diperkirakan sampai kelas IX (Katadata, 2018).

HDI Indonesia pada Tahun 2017 mencapai angka 70,81 %, tren HDI Indonesia ini terus mengalami peningkatan setiap Tahunnya, di saat yang bersamaan pula UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan HDI tersebut. *Pertama*, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. *Kedua*, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak di bawah usia satu Tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. *Ketiga*, akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi (Fauzi, 2018).

Selain itu, terdapat 139 negara yang dikaji oleh Bank Dunia, 10 besar negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi didominasi oleh negara-negara dari Amerika Selatan dan Afrika. Posisi teratas ditempati oleh Botswan dengan indeks gini sebesar 0,626 %, disusul oleh Afrika Selatan dengan indeks gini 0,623 %. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-62 negara paling timpang di dunia, dengan indeks gini sebesar 0,395 %. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2017, indeks gini di Indonesia mencapai angka 0,391 %, tipis saja di bawah rata-rata 2010-2015 yang diestimasi Bank Dunia. Namun, dalam tiga Tahun terakhir, indeks gini secara konsisten bergerak dalam tren menurun. Data tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin sangat tinggi, terutama diantara 10 negara tersebut (Cnbc Indonesia, 2018).

Selain indeks gini, pendapatan per kapita juga merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Berdasarkan data *Tradingeconomics* PDB per kapita Indonesia pada Tahun 2017 sebesar US\$ 4.130 atau Rp 51,89 juta, hal ini menunjukkan bahwa posisi PDB Indonesia berada pada urutan kelima diantara

negara-negara ASEAN, hal ini menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Sementara diposisi pertama PDB terbesar diperoleh oleh Singapura dengan PDB per kapita mencapai US\$ 55.235. Pendapatan per kapita tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 1.2
Pendapatan per Kapita Negara-Negara ASEAN
Sumber: Katadata, 2019

Hendrie Anto (2009) dalam penelitiannya yang membahas HDI di Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), berdasarkan hasil penelitiannya tersebut peringkat HDI Indonesia berada pada posisi ke-21 dari 55 negara yang tergabung dalam OKI dengan nilai HDI sebesar 73%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari Negara-Negara Islam yang tergabung dalam OKI, seperti Negara Brunei Darussalam yang menempati posisi pertama dengan nilai HDI sebesar 89% kemudian disusul Kuwait yang menempati posisi kedua dengan nilai HDI 89%. Sedangkan Negara Qatar berada pada posisi ketiga dengan nilai HDI 87%. Sementara Negara Uni Emirat Arab (U.E.A) menempati poisisi keempat dengan perolehan nilai HDI sebesar 87% Negara Bahrain menempati posisi kelima dengan nilai HDI sebesar 87% dan Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia menduduki posisi ke-9

dengan perolehan nilai HDI sebesar 81% dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Peringkat HDI Negara-Negara OKI

No	HDI	
	Negara	Nilai (%)
1.	Brunei	89
2.	Kuwait	89
3.	Qatar	87
4.	U.A.E	87
5.	Bahrain	87
6.	Libya	81
7.	Oman	81
8.	K.S.A	81
9.	Malaysia	81
10.	Albania	80
11.	Kazakhstan	79
12.	Turkey	77
13.	Suriname	77
14.	Jordan	77
15.	Lebanon	77
16.	Tunisia	77
17.	Iran	76
18.	Azerbaijan	75
19.	Maldives	74
20.	Algeria	73
21.	Indonesia	73

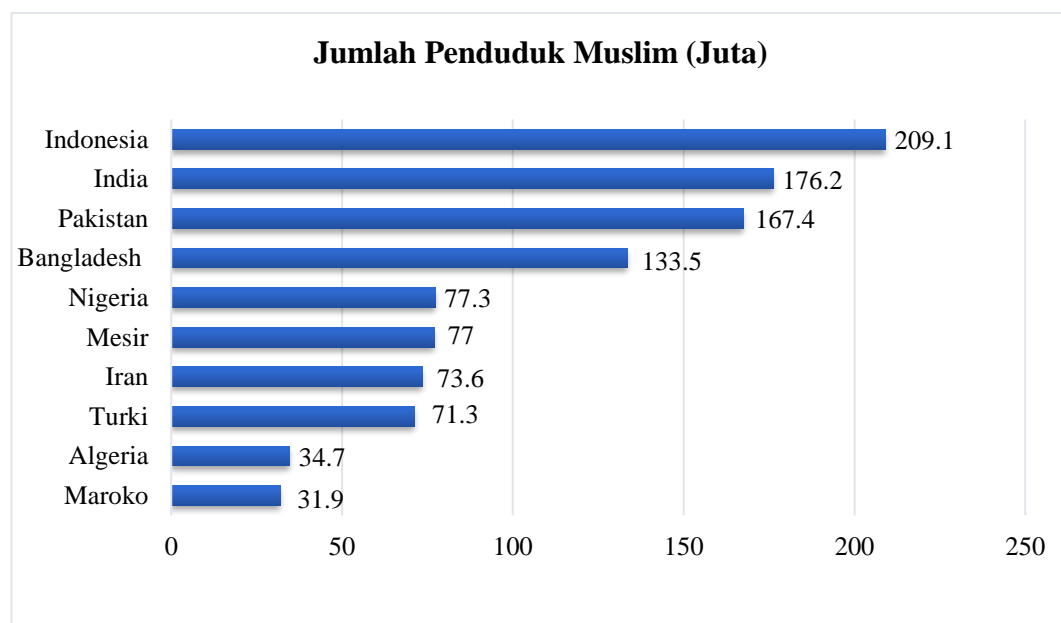
Sumber: Anto, 2009

Islam sebagai sistem kehidupan memiliki seperangkat aturan termasuk dalam hal ekonomi, pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat materil dan spiritual, akan tetapi mencakup pula pembangunan sumber daya manusia, sosial, kebudayaan dan yang lainnya (Yusuf M. Y., 2019). Tujuan dari pembangunan dalam perspektif Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif dan holistik baik di dunia dan di akhirat (Septriani & Herianingrum, 2017). Salah satu poin penting yang diatur Islam dalam ekonomi yaitu *maqashid syariah*. Penjelasan tentang *maqashid syariah* bahwa syariat Islam menghendaki secara mutlak keadilan dan kemaslahatan hidup umat islam yang diwujudkan melalui pembangunan secara utuh (Khasanah, 2015).

Menurut As-Syathibi, syari'at itu memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pandangan As-Syathibi seperti ini karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia dan tidak satupun

dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga jika hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*) (Aibak, 2015).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 % dari seluruh umat muslim di dunia (Katadata, 2018). Dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3
Sepuluh Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia

Sumber: Katadata, 2018

Ukuran pembangunan dalam Islam dikenal konsep *Islamic Human Development Index* (IHDI) yang pertama kali di perkenalkan oleh Anto sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran pembangunan manusia berdasarkan *maqashid syariah*, penelitian ini pertama kali dilakukan Anto pada Tahun 2009 dengan mengukur keberhasilan pembangunan manusia di Negara-negara OKI. Perhitungan IHDI menggunakan dimensi *maqashid syariah* yang terdiri dari lima dimensi yaitu meliputi dimensi agama (*ad-din*), dimensi akal (*al-aql*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi keturunan (*an-nasl*) dan dimensi harta (*al-maal*).

Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia menempati posisi ke 18 dengan IHDI sebesar 58%. Angka tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia sangat jauh tertinggal dengan negara-negara muslim yang lain, padahal Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim dan penganut agama terbanyak yaitu agama Islam, Indonesia masih kalah tertinggal dengan negara-negara muslim tetangga seperti, Brunei Darussalam dan Malaysia yang menduduki peringkat sepuluh besar negara-negara OKI dengan nilai IHDI Brunei Darussalam sebesar 90 yang menempati peringkat ke-2 setelah Qatar dan Malaysia yang menduduki posisi ke-6 dengan nilai IHDI sebesar 77%. Peringkat IHDI Indonesia dapat dilihat dari Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Peringkat IHDI Negara-Negara OKI

No	IHDI	
	Negara	Nilai (%)
1.	Qatar	90
2.	Brunei	90
3.	U.A.E	88
4.	Kuwait	85
5.	Bahrain	78
6.	Malaysia	77
7.	K.S.A	72
8.	Jordan	69
9.	Oman	66
10.	Turkey	66
11.	Tunisia	62
12.	Suriname	62
13.	Albania	60
14.	Kazakhstan	60
15.	Egypt	60
16.	Algeria	90
17.	Syria	58
18.	Indonesia	58
19.	Iran	58
20.	Maldives	58

Sumber: Anto, 2009

Sedangkan pada penelitian IHDI di Indonesia yang dilakukan oleh Rama & Yusuf, (2019) menunjukkan nilai IHDI di tiap Provinsi berbeda, terdapat 12 Provinsi yang dikategorikan pada level sedang diantaranya yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai IHDI 58% yang disusul Provinsi Bali dengan nilai IHDI 57% dan Provinsi Maluku Utara dengan nilai IHDI 55%, sedangkan 21 Provinsi yang lainnya berada di kategori rendah karena nilai IHDI yang diperoleh dibawah angka 50%, termasuk Provinsi DKI Jakarta yang menempati posisi ke 22 dengan nilai

IHDI 46% dan Provinsi Jawa Barat yang berada diposisi ke 29 dengan nilai IHDI 43%.

Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia dengan luas wilayah 35.377,76 Km² dan jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 27 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019). Selain itu Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 48.037.600 jiwa dengan persentase sebesar 18,3% (BPS, 2018)

Berdasarkan statistik (BPS, 2015) jumlah penduduk di Jawa Barat dengan penganut agama terbanyak yaitu agama Islam sebesar 93% sedangkan agama Katholik hanya 5% dan dibandingkan dengan agama Protestan, Hindu dan Budha yang jumlahnya dibawah 2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Jawa Barat menganut agama Islam, persentase penduduk Jawa Barat berdasarkan agama pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Agama Tahun 2014

Agama	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk (%)
Islam	40.907.538	93
Katholik	2.178.002	5
Protestan	478.207	1
Budha	234.393	1
Hindu	121.903	0
Total	43.920.043	100

Sumber: BPS, 2015

Ismail (2016) mengutip pernyataan Chapra yang menyebutkan bahwa dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan itu muncul dari adanya pandangan hidup (*worldview*) yang tujuannya sesuai dengan syariah yaitu berupa tauhid, prinsip khilafah dan *'adalah*. Selama ini HDI yang digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan manusia tidak representatif dan kurang mencerminkan kesejahteraan karena tidak adanya unsur religiusitas yang dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan manusia (Jatmiko & Hajrina, 2015).

HDI yang digunakan sebagai alat pengukuran pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan belum kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Akan lebih tepat jika negara yang mayoritas penduduknya muslim menggunakan indeks pembangunan manusia yang sesuai dengan perspektif Islam, indeks tersebut dikenal dengan

lim Koyimah, 2019

ANALISA PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Islamic Human Development Index (IHDI) (Septriani & Herianingrum, 2017). Munculnya IHDI sebagai alat ukur kesejahteraan manusia yang berlandaskan Alquran dan Hadits ini tentu berbeda dengan HDI yang mendasarnya tidak berdasarkan *maqashid syariah* sedangkan teori dan konsep IHDI berdasarkan *maqashid syariah*, yang meliputi dimensi agama (*ad-din*), dimensi akal (*al-aql*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi keturunan (*an-nasl*) dan dimensi harta (*al-maal*) (Anto, 2009).

Penelitian yang pertama kali dilakukan oleh Anto (2009), indikator yang digunakan dalam penelitiannya yaitu, indeks *ad-dien*: jumlah masjid, puasa, zakat, haji, dana amal, tingkat kriminalitas. Indeks *an-nafs*: usia harapan hidup, penggunaan narkoba dan perokok. Indeks *al-aql*: tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan, angka melek huruf, dan jumlah hak paten. Indeks *an-nasl*: jumlah keluarga, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat perceraian. Indeks *al-maal*: (*Gross Domestic Product*) GDP per kapita, pertumbuhan ekonomi, GDP pertumbuhan penduduk, rasio gini, dan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan dan juga persamaan. Perbedaan yang mendasar yaitu dari objek penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan mengukur IHDI 21 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat yang dijadikan objek penelitian ini dikarenakan memiliki beberapa hal yang menarik untuk dikaji yaitu diantaranya: 1) kualitas pembangunan manusia di Jawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada pada level tinggi yang dapat dilihat pada laporan BPS Jawa Barat, 2) memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan diproyeksikan pada Tahun 2020 total penduduk di Provinsi Jawa Barat sekitar 49,9 juta jiwa dan 3) mayoritas penduduk di Jawa Barat beragama Islam, hal ini sesuai dengan laporan BPS Jawa Barat bahwa 93% penduduk di Jawa Barat beragama Islam.

Selain itu, dalam mengukur IHDI ditentukan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan manusia, indikator-indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya, hal ini dikarenakan pengukuran IHDI indikator yang digunakannya belum ajek, selain itu indikator yang digunakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan manusia, dalam hal ini penulis ingin mengukur pembangunan manusia di Jawa Barat dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (IHDI). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisa Pembangunan Manusia dengan *Islamic Human Development Index* (IHDI) di Jawa Barat Tahun 2014-2018”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. HDI Indonesia setiap Tahun mengalami kenaikan akan tetapi belum menggambarkan kesejahteraan hal tersebut dapat dilihat dari angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia yang masih tinggi, HDI yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan manusia belum kompatibel dan belum cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif islam. (Septriani & Herianingrum, 2017). Selain itu HDI tidak representatif dalam mencerminkan kesejahteraan karena tidak adanya unsur religiusitas (Jatmiko & Hajrina, 2015).
2. Indonesia berada di peringkat ke-62 negara paling timpang di dunia, hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin amatlah tinggi (Cnbc Indonesia, 2018).
3. Pendapatan per kapita Indonesia menempati posisi kelima diantara negara-negara Asia Tenggara, hal ini menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand (Katadata, 2019).
4. Posisi IHDI Indonesia hanya menempati urutan ke-18, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia jauh tertinggal dengan negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia yang menduduki peringkat 10 besar negara-negara OKI (Hendrie Anto, 2009).
5. HDI Jawa Barat mengalami peningkatan setiap Tahunnya bahkan hampir mendekati perolehan HDI nasional, akan tetapi belum menggambarkan kesejahteraan di Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan angka kemiskinan di Jawa Barat masih tinggi (BPS, 2018).

6. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan penduduk Jawa Barat didominasi oleh penganut agama Islam (BPS, 2015).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pembangunan manusia berdasarkan *Islamic Human Development Index* di Jawa Barat periode 2014-2018 ?
2. Bagaimana perbandingan hasil pengukuran pembangunan manusia berdasarkan *Human Development Index* dan *Islamic human development index* di Jawa Barat periode 2014-2018 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan *Islamic Human Development Index* di Jawa Barat periode 2014-2018. Dimensi yang digunakan yaitu dimensi *maqashid syariah* yang tidak hanya menghitung dimensi harta, pendidikan dan kesehatan saja akan tetapi menyeluruh yaitu meliputi dimensi agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Selain itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan tingkat pembangunan manusia berdasarkan *Human Development Index* dan *Islamic Human Development Index* di Jawa Barat Tahun 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan dasar pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia dengan berlandaskan *maqashid syariah* sebagai alat ukur kesejahteraan manusia secara keseluruhan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan tentang pembangunan manusia berdasarkan *Islamic human development index* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia secara holistik (menyeluruh) dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.